

Pengembangan Pendidikan Keamilan

Irfan Syaqui Beik
Direktur Pusat Studi Bisnis dan Ekonomi Syariah (CIBEST) IPB

Salah satu implikasi penting dari upaya standarisasi pengelolaan zakat pada level internasional adalah pada peningkatan kapasitas dan kualifikasi SDM amil zakat. Hal ini dikarenakan oleh sejumlah tuntutan dalam 'Zakat Core Principles' yang memerlukan peningkatan kualitas SDM yang ada.

Sebagai contoh, dalam dokumen ZCP disebutkan tentang tingkat kecepatan pelayanan program bagi mustahik zakat, baik program konsumtif maupun produktif. Tentu ini membutuhkan kualifikasi SDM yang mampu melakukan 'delivery' program dengan baik, beserta persyaratan yang dibutuhkan. Untuk program pemberdayaan, tenaga pendamping menjadi kunci utama yang sangat menentukan keberhasilan program. Karena itu, diperlukan adanya kriteria yang jelas terkait tenaga pendamping yang

diperlukan.

Dengan tuntutan seperti ini, maka harus ada upaya sistematis untuk membangun sistem pendidikan keamilan yang tepat dan efektif. Dalam simposium internasional pendidikan ekonomi dan keuangan syariah yang diselenggarakan pada tanggal 23 Maret 2015 lalu di Doha Qatar, berbarengan dengan kegiatan the 10th International Conference on Islamic Economics and Finance, disepakati bahwa pendidikan keprofesional yang menunjang aplikasi ekonomi syariah pada sektor-sektor strategis seperti keuangan sosial syariah, perlu ditingkatkan kualitasnya dan perlu distandarisasikan. Untuk merealisasikannya, maka dukungan pemerintah dan stakeholder strategis menjadi sangat penting.

Ada baiknya kita belajar pada kesuksesan Malaysia dalam mengembangkan

pendidikan ekonomi dan keuangan syariah. Dalam konteks keuangan syariah, mereka menginisiasi pendidikan International Council of Islamic Finance Educators (ICIFE) sebagai wadah standarisasi pendidikan keuangan syariah pada level Malaysia. ICIFE juga didesain untuk menyusun standarisasi pada level global. Pemerintah Malaysia tidak segan-segan melakukan investasi yang cukup besar terkait hal ini.

Karena itu, penulis berharap ke depan pemerintah dan BAZNAS bisa menginisiasi pusat pendidikan SDM Amil di tanah air. Ada beberapa manfaat yang bisa diraih melalui pendirian pusat ini. Pertama, sebagai tempat untuk melakukan pembinaan dan pelatihan bagi para calon amil agar mereka memiliki penguasaan atas konsep dan operasionalisasi pengelolaan zakat. Kedua, sebagai media

untuk membangun karakter keamilan dan mentalitas yang diperlukan agar pelayanan zakat dapat berjalan dengan optimal.

Ketiga, sebagai sarana untuk melakukan kajian dan riset yang relevan dengan upaya peningkatan kompetensi dan kapasitas keamilan. Termasuk di dalamnya adalah pengembangan instrumen untuk menilai kinerja amil dari waktu ke waktu, sehingga dapat diketahui langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.

Selain itu, kerjasama dengan perguruan tinggi juga perlu diperkuat. Harus ada 'link and match' yang terjalin antara BAZNAS dengan kalangan kampus. Selama ini kerjasama tersebut telah dilakukan dalam konteks program, seperti program ZCD di beberapa wilayah. Namun demikian penulis berharap agar kerjasama tersebut dapat ditingkatkan levelnya.

Di antara

munj

Forum Antar Universitas khusus dalam sektor zakat. PAU ini bisa difungsikan sebagai wadah "think tank" untuk memberikan rekomendasi-rekomendasi strategis bagi pengembangan zakat nasional.

Sebagai contoh, kajian tentang manajemen resiko pengelolaan zakat beserta instrumen dan alat analisis untuk mengelola resiko bisa dikembangkan melalui kerjasama dalam wadah PAU itu. Demikian pula dengan pengembangan indikator untuk menilai efektivitas program sosialisasi zakat serta kinerja kelembagaan zakat yang ada. Masih banyak contoh lainnya. Pendeknya, PAU bisa dijadikan sebagai sarana untuk mengembangkan 'research-based policy' sehingga kinerja pengelolaan zakat dapat ditingkatkan. Wallahu a'lam.

KLIPING CETAK



MEDIA
INDONESIA

Hari: Senin

Tanggal: 13/4/2015

Halaman: 25